



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.45,2014

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Bantul.
Perubahan, Peraturan Bupati Bantul,
penetapan,indikator,kinerja utama.

BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16B TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011-2015

BUPATI BANTUL,

Menimbang: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015, perlu mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 16b);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 16b);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16B TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 16b), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- b. melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2014

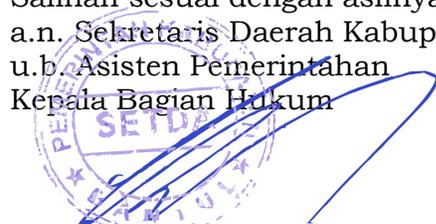
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 45 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 16B TAHUN 2011 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|---|--|---|
| 1. | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI |
| | | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Kementerian Dalam Negeri |
| 2. | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | Opini pemeriksaan BPK | Formulasi pengukuran: Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Formulasi pengukuran: Nilai IKM Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bagian Organisasi |
| 4. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu | Formulasi pengukuran: Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seratus ribu Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|----------------------------------|------------------------|---|
| | | Angka Kematian Bayi | Formulasi pengukuran: Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Bantul selama satu tahun dibagi jumlah dengan kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seribu Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Gizi Buruk | Formulasi pengukuran: Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Bantul selama satu tahun dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |
| | | Umur Harapan Hidup | Formulasi pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| 5. | Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka melek huruf | Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Rata-rata lama sekolah | Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: BPS |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---|--|
| 6. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | Formulasi pengukuran: PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1, dibagi dengan PDRB tahun n-1 dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Indeks Gini | Formulasi pengukuran: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: BPS |
| 7. | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Tingkat Ketersediaan Energi | Formulasi pengukuran: $100 + \left[\frac{\text{angka ketersediaan energi} - 2200}{2200} \right] \times 100$ Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan |
| | | Tingkat ketersediaan Protein | Formulasi pengukuran: $100 + \left[\frac{\text{angka ketersediaan protein} - 57}{57} \right] \times 100$ Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan |
| 8. | Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata | Persentase peningkatan jumlah wisatawan | Formulasi pengukuran: Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi dengan jumlah wisatawan n-1 kalikan seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 9. | Menurunnya tingkat pengangguran | Angka pengangguran | Formulasi pengukuran: Jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| 10. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin | Persentase jumlah penduduk miskin | Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| 11. | Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana | Persentase Desa Tangguh | Formulasi pengukuran: Jumlah desa tangguh dibagi seluruh desa dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPBD |

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 45 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 16B TAHUN 2011 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 (SKPD) TAHUN 2011-2015**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

- 1 Nama Organisasi : Sekretariat Daerah
- 2 Tugas Utama : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah
- 3 Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI |
| | | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri RI Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Kementerian Dalam Negeri RI |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|--|---|--|
| | | Persentase Perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti | Formulasi pengukuran: Jumlah perikatan kerja sama (MoU) yang ditindaklanjuti dibagi jumlah perikatan kerja sama (MoU) pada tahun yang bersangkutan kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah |
| 2. | Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi | Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | Formulasi pengukuran: Pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik dibagi jumlah seluruh pengadaan kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bagian Administrasi Pembangunan |
| | | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | Formulasi pengukuran: Nilai PMPRB Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Inspektorat |
| | | Persentase belanja pegawai | Formulasi pengukuran : Jumlah belanja pegawai dibagi belanja daerah dikalikan seratus persen Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : DPPKAD |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Formulasi pengukuran: Nilai IKM Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bagian Organisasi |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1 Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. penyelenggaraan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik;
e. penyiapan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati;
f. melaksanakan kesekretariatan Badan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|---|--|
| 1. | Konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan kabupaten | Persentase program dan kegiatan RKPD yang sesuai dengan RPJMD | Formulasi pengukuran: Jumlah program kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RPJMD kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Pengendalian Program |
| 2. | Pencapaian target kinerja pembangunan meningkat | Persentase realisasi target kinerja tahunan dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD | Formulasi pengukuran: Jumlah target indikator kinerja yang tercapai dibagi dengan jumlah indikator kinerja dalam RPJMD kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan |
| 3. | Perencanaan pembangunan berbasis <i>bottom up</i> meningkat | Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD | Formulasi pengukuran: Jumlah kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD dibagi dengan Jumlah seluruh kegiatan RKPD dikalikan seratus persen |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Pengendalian Program |
| 4. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | Formulasi pengukuran: PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1, dibagi dengan PDRB tahun n-1 dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Indeks Gini | Formulasi pengukuran: $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: BPS |
| | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin | Persentase jumlah penduduk miskin | Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

- 1 Nama Organisasi : Inspektorat
- 2 Tugas Utama : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
- 3 Fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|--|--|
| 1. | Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi | Indikasi penyimpangan anggaran | Formulasi pengukuran: Jumlah indikasi penyimpangan anggaran dibagi jumlah APBD kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Sekretariat |
| | | Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai | Formulasi pengukuran: Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai tahun n dibagi jumlah seluruh SKPD yang dievaluasi kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Sekretariat |
| | | Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti | Formulasi pengukuran: Jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan eksternal dan internal kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Sekretariat |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|------------------------------------|--|--|
| | | SKPD yang nilai AKIP baik | Formulasi pengukuran: Jumlah SKPD yang nilai AKIP baik tahun (n) dibagi seluruh SKPD yang dievaluasi kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Sekretariat |
| 2. | Tertanganinya pengaduan masyarakat | Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti | Formulasi pengukuran: Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pengaduan kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Sekretariat |

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- 1 Nama Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|--|---|
| 1. | Terciptanya manajemen kepegawaian yang berkualitas | Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi | Formulasi pengukuran: Jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi kebutuhan formasi jabatan kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BKD |
| 2. | Terwujudnya pelayanan prima bidang kepegawaian | IKP (Indeks Kepuasan Pegawai) | Formulasi pengukuran: Survey IKP Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BKD |

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

- 1 Nama Organisasi : Dinas Kesehatan
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan dan atau penetapan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. penyediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---------------------|--|
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka kematian ibu | Formulasi pengukuran: Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama kali seratus ribu Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |
| | | Angka kematian Bayi | Formulasi pengukuran: Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Bantul selama satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seribu Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |
| | | Gizi Buruk | Formulasi pengukuran: Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Bantul selama satu tahun dibagi jumlah bayi yang ditimbang pada tahun yang sama kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|--|---|
| | | Umur Harapan Hidup | Formulasi pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang. Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Prevalensi HIV | Formulasi pengukuran: Jumlah penderita HIV dibagi jumlah penduduk kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Persentase Puskesmas yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) | Formulasi pengukuran: Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan SMM dibagi seluruh Puskesmas kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat | Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dibagi jumlah seluruh penduduk kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, BKKPP dan KB |

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1 Nama Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, dan perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|-----------------------------|---|
| 1. | Terpenuhinya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya | Produksi perikanan tangkap | Formulasi pengukuran: Jumlah produksi perikanan tangkap tahun yang bersangkutan Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Statistik Kelautan dan Perikanan |
| | | Produksi perikanan budidaya | Formulasi pengukuran: Jumlah produksi perikanan budidaya tahun yang bersangkutan Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Statistik Kelautan dan Perikanan |
| 2. | Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan | Angka ketersediaan ikan | Formulasi pengukuran: Jumlah (Produksi + ikan masuk – ikan keluar) dibagi jumlah penduduk Kabupaten Bantul Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Statistik Kelautan dan Perikanan |
| 3. | Terkelolanya sumber daya perairan kelautan dan perikanan dan perlindungan fungsi lingkungan | Luas kawasan konservasi | Formulasi pengukuran: Luas kawasan konservasi yang dikelola tahun yang bersangkutan Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Statistik Kelautan dan Perikanan |

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

- 1 Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|--|--|
| 1. | Menurunnya tingkat pengangguran | Angka pengangguran | Formulasi pengukuran: Jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja | Persentase penempatan Tenaga Kerja | Formulasi pengukuran: Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan dibagi dengan pencari kerja yang terdaftar kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kerja |
| | | Persentase perluasan kerja | Formulasi pengukuran : Jumlah pencari kerja yang berwirausaha dibagi dengan pencari kerja yang mendaftar Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja |
| 3. | Meningkatnya penempatan transmigran | Persentase jumlah transmigran yang ditempatkan | Formulasi pengukuran: Jumlah warga transmigran yang ditempatkan dibagi jumlah pendaftar |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bidang Transmigrasi |
| 4. | Meningkatnya perlindungan pekerja | Persentase penyelesaian sengketa hubungan industrial | Formulasi pengukuran: Jumlah sengketa hubungan industrial yang berhasil diselesaikan dibagi dengan jumlah sengketa Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan |
| | | Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Formulasi pengukuran : Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah seluruh pekerja Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Disnakertrans |

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- 1 Nama Organisasi : Dinas Pertanian dan Kehutanan
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan kehutanan
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan kehutanan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian dan kehutanan;
d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian serta pengembangan agropolitan | Pertumbuhan produksi tanaman pangan (padi) | Formulasi pengukuran: $\frac{\text{Produksi tahun } n-(n-1)}{\text{Produksi } (n-1)} \times 100\%$ Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Tanaman Pangan |
| | | Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam ras, ayam pedaging dan itik) | Formulasi pengukuran: Jumlah populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam ras, ayam pedaging dan itik) dikonversi dalam satuan ternak: Sapi: 1 satuan ternak setara dengan 1 ekor, Kambing/domba: 1 satuan ternak setara dengan 7 ekor, Ayam/itik: 1 satuan ternak setara dengan 100 ekor Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Pengembangan Peternakan |
| 2. | Mendukung terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian | Persentase alih fungsi lahan pertanian | Formulasi pengukuran: $\frac{\text{Luas alih fungsi lahan pertanian}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$ Tipe penghitungan: Kumulatif |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Sumber data: Bidang Sarana, Prasarana dan Agribisnis, BPS |
| 3. | Mendukung terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati | Luas lahan kritis | Formulasi pengukuran: Luas lahan yang tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan perlindungan tanah dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 25% dan ada gejala erosi Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Kehutanan |
| 4. | Terkelolanya sumberdaya hutan | Rasio luas lahan hutan budidaya | Formulasi pengukuran: (Jml luas hutan rakyat budidaya+luas kawasan hutan negara) / (Jumlah luas hutan rakyat+hutan negara) x100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Kehutanan |

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL

- 1 Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|----------------------------------|--|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka melek huruf | Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Rata-rata lama sekolah | Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Angka Partisipasi Sekolah Sekolah Menengah | Formulasi pengukuran: Jumlah anak usia sekolah Kabupaten Bantul yang bersekolah dibagi jumlah anak usia sekolah di Bantul kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: BPS/Dinas Pendidikan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|--|---|---|
| | | | Menengah dan Non Formal |
| 2. | Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya | APK sekolah menengah (SMA/MA/SMK/Paket C) | Formulasi pengukuran: Persentase jumlah siswa yang sekolah SMA/MA/SMK/Paket C dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal |
| | | APK TK/ PAUD | Formulasi pengukuran: Jumlah peserta didik TK/PAUD dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal |
| 3. | Meningkatnya Capaian tingkat lulusan SMA/MA/SMK | Persentase Kelulusan SMA/MA/SMK | Formulasi pengukuran: Jumlah siswa yang lulus dibagi jumlah siswa tahun n kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal |
| 4. | Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya | APM sekolah menengah (SMA/MA/SMK) | Formulasi pengukuran: Jumlah siswa usia 16-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dikalikan 100 persen Tipe penghitungan : Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal |
| 5. | Meningkatnya Capaian rata-rata nilai ujian nasional SMA/MA/SMK | Rata-rata nilai ujian nasional | Formulasi pengukuran: Jumlah dari rata-rata nilai ujian nasional seluruh siswa dibagi jumlah siswa Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal |

J. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- 1 Nama Organisasi : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel | Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah | Formulasi pengukuran: Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: BPK RI |
| | | Persentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi | Formulasi pengukuran: Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah alokasi kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: DPPKAD |
| | | Persentase SKPD yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah | Formulasi pengukuran: SKPD yang menerapkan SAP dibagi seluruh SKPD kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: DPPKAD |
| | | Persentase keakuratan data barang milik daerah | Formulasi pengukuran: Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan Tipe penghitungan: Kumulatif |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--|--|--|
| | | | Sumber data: Bidang Aset |
| 2. | Meningkatkan kemampuan keuangan daerah | Persentase pertumbuhan pendapatan daerah | Formulasi pengukuran: Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: DPPKAD |
| | | Derajat desentralisasi keuangan daerah | Formulasi pengukuran: Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: DPPKAD |
| | | Persentase kemampuan keuangan daerah | Formulasi pengukuran: Pendapatan asli daerah dibagi total belanja daerah kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: DPPKAD |

K. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

- 1 Nama Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi penanaman modal;
d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan peningkatan kapasitas KUKM | Persentase Peningkatan Nilai Produksi KUKM | Formulasi pengukuran: Persentase dari selisih kapasitas produksi tahun ini dengan kapasitas produksi tahun lalu di bagi kapasitas produksi tahun lalu Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data : Bidang Perindustrian |
| | | Persentase peningkatan Koperasi berbadan hukum | Formulasi pengukuran: Persentase dari Selisih koperasi ber BH tahun ini dengan koperasi ber BH tahun ini tahun lalu di bagi koperasi ber BH tahun ini tahun lalu Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Bidang Koperasi |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah | Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN/KUKM) | Formulasi pengukuran: Persentase dari Selisih investasi riil (PMA/PMDN) tahun ini dengan investasi riil (PMA/PMDN) tahun lalu di bagi investasi riil (PMA/PMDN) tahun lalu Tipe penghitungan: Kumulatif |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--|--|--|
| | | | Sumber data : Disperindagkop |
| 3. | Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Persentase penurunan barang tidak layak edar | Formulasi pengukuran: Persentase dari selisih penemuan barang tidak layak edar tahun ini dengan penemuan barang tidak layak edar tahun lalu dibagi penemuan barang tidak layak edar tahun lalu Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bidang Perdagangan |
| 4. | Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan | Persentase peningkatan ekspor | Formulasi pengukuran: Persentase dari Selisih Nilai Ekspor tahun ini dengan Nilai Ekspor tahun lalu dibagi Nilai Ekspor tahun lalu Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bidang Perdagangan |
| | | Persentase peningkatan omset perdagangan | Formulasi pengukuran: Persentase dari Selisih Omset tahun ini dengan omset tahun lalu dibagi omset tahun lalu Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Bidang Perdagangan |

L. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM

- 1 Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan umum
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
 - d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---|---|
| 1 | Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian | Persentase alih fungsi lahan pertanian | Formulasi pengukuran: Luas alih fungsi lahan pertanian dibagi luas lahan pertanian Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas PU |
| 2 | Berkembangnya kawasan strategis di Kabupaten Bantul | Persentase kesesuaian pengembangan kawasan strategis dengan perencanaan tata ruang / RDTR | Formulasi pengukuran: Jumlah pengembangan kawasan strategis dibagi jumlah rencana pengembangan dalam RDTR di kawasan strategis dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas PU |
| 3 | Meningkatnya sarana dan prasarana publik | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | Formulasi pengukuran: Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas PU |
| 4 | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | Persentase rumah tidak layak huni | Formulasi pengukuran: Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah seluruh rumah kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas PU |

M. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SUMBER DAYA AIR

- 1 Nama Organisasi : Dinas Sumber Daya Air
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sumber daya air
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air dan energi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air dan energi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sumber daya air dan energi
d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---|---|
| 1 | Terlayannya kebutuhan irigasi | Saluran irigasi dalam kondisi baik (jaringan utama) | Formulasi pengukuran: Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi seluruh saluran irigasi Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas SDA |
| | | Persentase luasan daerah irigasi yang terlayani air irigasi | Formulasi pengukuran: Luasan daerah irigasi yang terlayani air irigasi dibagi luasan daerah irigasi Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas SDA |
| 2 | Terlindunginya kawasan dari bahaya banjir | Persentase penurunan penanganan banjir (luapan) | Formulasi pengukuran: Luasan kawasan yang tertangani saat banjir dibagi luasan kawasan yang terkena banjir Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas SDA |
| 3 | Terlayannya pengelolaan mineral bukan logam, batuan dan sumberdaya alam | Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun | Formulasi pengukuran: Luas kerusakan akibat penggalian dan penambangan Tipe penghitungan: Kumulatif |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | | Sumber data: Dinas SDA |
| | | Reklamasi lahan bekas galian C | Formulasi pengukuran: Luas lahan bekas galian C yang direklamasi Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas SDA |

N. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DASAR

- 1 Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Dasar
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dasar;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka melek huruf | Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Rata-rata lama sekolah | Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPS |
| | | Angka Partisipasi Sekolah Dasar | Formulasi pengukuran: Jumlah anak usia sekolah Kabupaten Bantul yang bersekolah dibagi jumlah anak usia sekolah di Bantul kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: BPS/Dinas Pendidikan Dasar |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|---|--|---|
| 2. | Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikannya | APK sekolah SD, MI, Paket A, SMP, MTs | Formulasi pengukuran: Persentase jumlah siswa yang sekolah SD, MI, Paket A, SMP, MTs dibagi jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Dasar |
| 3. | Meningkatnya Capaian tingkat lulusan SD, MI, Paket A, SMP, MTs | Persentase Kelulusan SD, MI, Paket A, SMP, MTs | Formulasi pengukuran: Jumlah siswa yang lulus dibagi jumlah siswa tahun n kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Dasar |
| 4. | Capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikannya | APM sekolah SD, MI, Paket A, SMP, MTs | Formulasi pengukuran: Jumlah siswa usia 7-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun dikalikan 100 persen Tipe penghitungan : Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Dasar |
| 5. | Meningkatnya Capaian rata-rata nilai ujian nasional SD, MI, Paket A, SMP, MTs | Rata-rata nilai ujian nasional | Formulasi pengukuran: Jumlah dari rata-rata nilai ujian nasional seluruh siswa dibagi jumlah siswa Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Dinas Pendidikan Dasar |

O. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL

- 1 Nama Organisasi : Dinas Sosial
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--|---------------------------|---|
| 1. | Berkurangnya PMKS | Persentase PMKS | Formulasi pengukuran: Jumlah PMKS dibagi jumlah penduduk kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial |
| 2. | Meningkatnya ketersediaan panti sosial | Kapasitas panti social | Formulasi pengukuran: Jumlah kapasitas panti sosial di Kabupaten Bantul dibagi jumlah penduduk yang membutuhkan sarana panti sosial kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial |
| 3. | Berkurangnya penderita HIV/AIDS | Persentase penderita AIDS | Formulasi pengukuran: Jumlah penderita HIV AIDS di bagi jumlah penduduk kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial |
| 4. | Berkurangnya pengguna NAPZA | Persentase Pengguna NAPZA | Formulasi pengukuran: Jumlah Pengguna NAPZA di bagi jumlah penduduk kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial |

P. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

- 1 Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
 - d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Meningkatnya keselamatan lalu lintas | Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | Formulasi pengukuran: Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100% Tipe perhitungan Non kumulatif Sumber data Dinas Perhubungan Satlantas Polri |

Q. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1 Nama Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Pelayanan administrasi kependudukan | Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | Formulasi pengukuran: Jumlah kumulatif KK terbit dibagi jumlah Keluarga dikali 100% Tipe perhitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase cakupan kepemilikan KTP | Formulasi pengukuran: Jumlah KTP terbit dibagi wajib KTP dikali 100% Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase cakupan kepemilikan kutipan Akta Kelahiran | Formulasi pengukuran: Jumlah akta kelahiran terbit dibagi jumlah kelahiran bayi kali 100% Tipe perhitungan Kumulatif Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase cakupan kepemilikan kutipan Akta | Formulasi pengukuran: Jumlah akta kematian dibagi jumlah penduduk yang meninggal kali 100% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | Kematian | Tipe perhitungan Kumulatif Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

R. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- 1 Nama Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya destinasi wisata (desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, dan kelompok kesenian) | Jumlah peningkatan destinasi wisata | Formulasi pengukuran: Jumlah kumulatif tahun n dikurangi jumlah kumulatif tahun n-1 Tipe perhitungan Kumulatif Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2 | Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata | Persentase peningkatan jumlah wisatawan | Formulasi pengukuran: Jumlah wisatawan tahun n dibagi jml wisatawan tahun n dikurangi jml wisatawan tahun n-1 dikali seratus persen Tipe penghitungan Non Kumulatif Sumber data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3 | Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal | Persentase organisasi budaya berpredikat maju | Formulasi pengukuran Organisasi budaya maju/organisasi budaya dikali 100 persen Tipe penghitungan Kumulatif Sumber data Dinas Kebudayaan & Pariwisata |

S. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIJINAN

- 1 Nama Organisasi : Dinas Perijinan
- 2 Tugas Utama : melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perijinan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perijinan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perijinan;
 - d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan Pengukuran (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|---|---|--|
| 1 | Menurunnya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan | Persentase terjadinya pengaduan/gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah diterbitkan | Tipe penghitungan: Jumlah pengaduan resmi/gugatan terhadap ijin yang telah diterbitkan oleh dinas perijinan dalam satu tahun dibagi jumlah ijin yang telah dikeluarkan dalam satu tahun kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Perijinan |
| 2 | Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Persentase unit usaha masyarakat telah memiliki ijin | Tipe penghitungan: Jumlah unit usaha yang wajib dan telah memiliki ijin di bagi dengan jumlah usaha yang wajib memiliki ijin Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Perijinan |

T. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

- 1 Nama Organisasi : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- 3 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
b. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
d. penyelenggaraan kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul;
e. penyelenggaraan kesekretariatan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bantul;
f. penyelenggaraan kesekretariatan Badan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | Tingkat Ketersediaan Energi | Formulasi pengukuran: $100 + \left[\frac{\text{angka ketersediaan energi} - 2200}{2200} \right] \times 100$ Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan |
| | | Tingkat ketersediaan Protein | Formulasi pengukuran: $100 + \left[\frac{\text{angka ketersediaan protein} - 57}{57} \right] \times 100$ Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan |
| | | Pola Pangan Harapan | Formulasi pengukuran: Jumlah persentase angka kecukupan gizi (AKG) dikalikan bobot Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan |

U. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1 Nama Organisasi : Badan Lingkungan Hidup
- 2 Tugas Utama : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--|
| 1. | Peningkatan kualitas air | BOD | Formulasi pengukuran: Hasil BOD dibagi total jumlah titik sampel Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |
| | | COD | Formulasi pengukuran: Hasil COD (nilai kisaran) dibagi total jumlah titik sampel Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |
| | | Bakteri Coli | Formulasi pengukuran: Nilai Perhitungan Bakteri Coli Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |
| 2. | Peningkatan kualitas udara ambien | Konsentrasi CO | Formulasi pengukuran: Pengukuran konsentrasi CO Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |
| | | Konsentrasi HC | Formulasi pengukuran: Pengukuran konsentrasi HC Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | Pb | Formulasi pengukuran: Pengukuran konsentrasi Pb Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |
| | | NOx | Formulasi pengukuran: Pengukuran konsentrasi NOx Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |
| | | Partikulat PM.10 | Formulasi pengukuran: Pengukuran partikulat PM.10 Tipe penghitungan: Non Kumulatif Sumber data: Badan Lingkungan Hidup |

V. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

- 1 Nama Organisasi : Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 2 Tugas Utama : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 3 Fungsi : a perumusan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
d pelaksanaan kesekretariatan Badan;
e pelaksanaan program kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan;
f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan Gender | Formulasi pengukuran: $IDJ = 1/3 (I \text{ par} + IDM + I \text{ Inc-dis})$ dimana Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen, IDM = Indeks Pengambilan Keputusan, linc-dis = Indeks distribusi pendapatan Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: BKK PP KB |
| | | Persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Formulasi pengukuran: Jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), BPS dan BKK PP KB |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|------------|--------------------------|--|---|
| | | Persentase Kesejahteraan dan ketahanan keluarga | Formulasi pengukuran: Persentase Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 dibagi jumlah seluruh keluarga kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BKK PP KB |
| | | Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif | Formulasi pengukuran: Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB aktif dibagi jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) kali seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BKK PP KB |

W. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 1 Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2 Tugas Utama : a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3 Fungsi : a perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 b pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|--|-------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana | Persentase Desa Tangguh | Formulasi pengukuran: Jumlah desa tangguh dibagi seluruh desa dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: BPBD |

X. INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI

- 1 Nama Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
- 2 Tugas Utama : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pelayanan Kesehatan
- 3 Fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit;
 - b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan rumah sakit;
 - c pembinaan dan pengendalian pelayanan rumah sakit; dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--|---|--|
| 1 | Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan | Pemakaian Tempat Tidur Rawat Inap (BOR) | Formulasi Pengukuran: Jumlah hari perawatan dibagi Jumlah tempat tidur kali hari perawatan dikalikan seratus persen Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber data: Instalasi rekam medik dan pelaporan |
| | | Rata-rata lama hari perawatan (LOS) | Formulasi Pengukuran: Lama hari rawat pasien dibagi jumlah pasien yang keluar (hidup+mati) Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber data: Instalasi rekam medik dan pelaporan |

Y. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- 1 Nama Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2 Tugas Utama : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3 Fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c pembinaan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
- e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja :
Utama

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|--|---|
| 1 | Meningkatnya kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat | Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi | Formulasi pengukuran: Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi dibagi dengan jumlah keseluruhan lembaga pemberdayaan masyarakat kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Kantor PMD |

Z. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

- 1 Nama Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 3 Fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - c pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - d melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
 - e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja :
Utama

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|------------------------------|--|
| 1 | Terciptanya situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif | Persentase penurunan konflik | Formulasi pengukuran: Jumlah konflik tahun lalu dikurangi jumlah konflik tahun berjalan dibagi konflik tahun lalu kali seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Kantor Kesbangpol |

AA. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM

- 1 Nama Organisasi : Kantor Perpustakaan Umum
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan
- 3 Fungsi : a perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan;
c pembinaan dan pengendalian perpustakaan;
d melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya cakupan pelayanan perpustakaan | Persentase Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan | Formulasi Pengukuran : Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Bantul Tahun n dibagi Jumlah penduduk Bantul dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Kantor Perpustakaan Umum |

BB. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR ARSIP

- 1 Nama Organisasi : Kantor Arsip
- 2 Tugas Utama : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang arsip dan dokumentasi
- 3 Fungsi : a perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan;
b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kearsipan;
c pembinaan dan pengendalian kearsipan;
d melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|--|--------------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi | Jumlah arsip yang dimanfaatkan | Formulasi Pengukuran: Jumlah arsip yang dimanfaatkan dibagi jumlah arsip yang dimiliki dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Kantor Arsip |

CC. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENGELOLAAN PASAR

- 1 Nama Organisasi : Kantor Pengelolaan Pasar
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengelolaan Pasar
- 3 Fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
 - b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
 - c pembinaan dan pengendalian pengelolaan pasar;
 - d melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
 - e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas pasar | Persentase kondisi pasar dalam keadaan baik | Formulasi Pengukuran: Jumlah pasar dalam keadaan baik dibagi jumlah seluruh pasar dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Kantor Pengelolaan Pasar |

DD. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA

- 1 Nama Organisasi : Kantor Pengolahan Data Telematika
- 2 Tugas Utama : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
- 3 Fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis teknologi informasi;
 - b penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum teknologi informasi;
 - c pembinaan dan pengendalian teknologi informasi;
 - d melaksanakan ketatausahaan Kantor; dan
 - e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|--|---|--|
| 1 | Pengembangan sistem Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | Layanan unggulan <i>digital government services</i> (DGS) | Formulasi Pengukuran: jumlah layanan digital government services (DGS) Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data : Kantor Pengolahan Data Telematika |

EE. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- 1 Nama Organisasi : Kantor Pemuda dan Olahraga
- 2 Tugas Utama : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pemuda dan Olah Raga
- 3 Fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga;
 - b pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemuda dan olah raga;
 - c pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga;
 - d pelaksanaan ketatausahaan kantor; dan
 - e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|---|---|---|
| A | Terwujudnya kapasitas olahraga yang berkualitas | Cakupan peningkatan prestasi cabang olah raga | Formulasi Pengukuran: Jumlah perolehan medali dalam kompetisi olahraga tingkat provinsi dan nasional Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data : Kantor Pemuda dan Olahraga |

FF. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama Organisasi | : | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | Tugas Utama | : | a menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; d menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. |
| 3 | Fungsi | : | a penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; d penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah |

4. Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (<u>formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data</u>) |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 1 | Fasilitasi pembahasan Produk Hukum DPRD | Persentase pencapaian prolegda | Formulasi pengukuran: Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun n dibagi jumlah prolegda dikalikan seratus persen Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

GG. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 1 Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
- 2 Tugas Utama : menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja :
Utama

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data) |
|-----|------------------------------|------------------------------|--|
| A | Meningkatnya penegakan Perda | Menurunnya pelanggaran Perda | Formulasi pengukuran: Jumlah pelanggaran Perda pada tahun n Tipe penghitungan: Non kumulatif Sumber data: Satpol PP |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI